

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan konsep-konsep yang menjadi landasan utama baik untuk melakukan analisa penelitian maupun untuk memperluas mengenai wawasan ilmu kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial, peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) desa dalam pendampingan program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

#### **2.1. Tinjauan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

##### **2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep yang mempunyai arti yang sangat luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjukkan pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat,

terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Adapun konsep kesejahteraan sosial menurut Friedlander (Fahrudin 2014:9) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dan dinamis dengan segala keterampilan ilmiah, yang berusaha mengembangkan metodologi dari aspek strategi dan teknis untuk menangani masalah sosial dengan bertujuan membantu individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Menurut Suharto (2014:1) kesejahteraan sosial adalah

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto di atas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dan bertujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### **2.1.2. Tinjauan Kesejahteraan Sosial**

Menurut Adi Fahrudin (2014:10) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber- sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan kutipan di atas, tujuan kesejahteraan sosial berfokus pada pola pencapaian kehidupan pokok manusia yang mencakup kebutuhan ekonomi fisik, ekonomi, sosial, serta penyesuaian diri terhadap taraf hidup yang memuaskan bagi kehidupannya.

### **2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi- konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta mampu menciptakan kondisi yang mampu mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Friedlander dan Apte (Fahrudin, 2014: 2) fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. fungsi Penyembuhan (*Curative*)  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi- kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.
- c. Fungsi Pengembangan (*Development*).  
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).  
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain.

Berdasarkan kutipan di atas, fungsi – fungsi kesejahteraan sosial meliputi fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, penunjang bagi kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi masyarakat itu sendiri.

#### **2.1.4. Pendekatan Kesejahteraan Sosial**

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Menurut Midgley dalam Fahrudin (2014:51) pendekatan- pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. **Filantropi sosial**  
 Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis
2. **Pekerjaan sosial**  
 Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan professional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.
3. **Administrasi sosial**  
 Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.
4. **Pembangunan sosial**  
 Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.
5. **Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi Sosial dan pembangunan sosial.** Filantropi yang bersifat *charity* atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat nya. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## **2.2. Tinjauan tentang pekerja sosial**

### **2.2.1. Pekerja Sosial**

Pekerjaan sosial pada dasarnya adalah aktivitas dalam pertolongan atau membantu individu, kelompok dan masyarakat yang sedang menghadapi masalah

dalam kehidupannya. Menurut Zastrow (1999) dalam Huraerah (2011:38) bahwa: “Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.

Berdasarkan definisi di atas menyatakan bahwa pekerja sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif. Pekerjaan sosial pada dasarnya adalah pekerjaan yang fokus utamanya adalah pada peningkatan keberfungsian sosial sosial individu, kelompok dan masyarakat dalam situasi-situasi sosial mereka. Sementara itu, pengertian pekerjaan sosial menurut IFSW (2000) dalam Huraerah (2011:38) menyatakan sebagai berikut:

Profesi pekerjaan sosial adalah untuk mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan kemanusiaan dan pemberdayaan serta kebebasan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial mengintervensi pada titik-titik dimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia keadilan sosial adalah hal yang penting bagi pekerjaan sosial

Definisi pekerjaan sosial di atas menjelaskan bahwa pekerja sosial mempunyai peran untuk mendorong perubahan sosial kearah yang lebih baik dalam bentuk pemecahan masalah dan pemberdayaan individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, pekerja sosial mengintervensi pada titik-titik dimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya artinya pekerja sosial

mengumpulkan data yang membuat masyarakat itu bermasalah setelah itu mencari pemecahan masalah dengan membantu masyarakat.

Pekerjaan sosial mempunyai misi yang harus diterapkan dalam profesinya. Menurut NASW dalam Fahrudin (2014:66) menyebutkan: “Misi utama pekerjaan sosial sebagai berikut untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dengan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang rawan, tertindas, dan miskin”. Dalam hal ini misi pekerjaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan terutamanya bagi orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014:66) yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa tujuan pekerjaan sosial yaitu meningkatkan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan menghubungkan orang dengan sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan sehingga mereka terbantu untuk memecahkan permasalahan dalam hidupnya, memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan

sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan dengan hal itu fungsi dari pekerjaan sosial akan memberi efek yang sangat membantu pada kesejahteraan, mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial agar menciptakan suatu produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain keempat tujuan dari pekerjaan sosial menurut NASW, Zastrow (2008) dalam Fahrudin (2014:67) menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Penjelasan mengenai tujuan pekerjaan sosial tersebut menyatakan bahwa pekerjaan sosial mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan sosial yang mereka hadapi di lingkungan sosial dengan tujuan mengembalikan keberfungsian mereka agar bisa hidup layak, bantuan yang bisa diberi oleh pekerjaan sosial yaitu memperjuangkan dari ketidakadilan sosial, mengusahakan kebijakan, pelayanan dan sumber-sumber melalui advokasi, mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan guna untuk mengembangkan praktik pekerjaan sosial dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Pekerjaan sosial adalah satu di antara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial. Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan atau pertolongan yang



dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dikemukakan oleh Max Siporin (1975) dalam Huraerah (2011:39) sebagai berikut:

1. Pelayanan akses, mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
2. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak dan lain-lain.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan.

Bentuk dari pelayanan sosial yang dijelaskan diatas yaitu pekerja sosial harus bisa mendekati seseorang yang bermasalah dengan pelayanan akses dengan tujuan agar seseorang tersebut bisa menggunakan pelayanan sosial yang sudah tersedia, pelayanan terapis, pertolongan dan rehabilitasi serta pelayanan sosialisasi dan pengembangan, dengan hal itu pelayanan sosial harus bisa dimanfaatkan dan dilajalakan dengan semaksimal mungkin demi menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berfungsi secara sosialnya.

### **2.2.2. Metode Pekerja Sosial**

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat. Tentu dalam hal ini mempunyai metode dalam melakukan pertolongan, dalam menjalankan proses pertolongannya pekerjaan sosial menggunakan beberapa metode yaitu *case work*,

*groupwork*, dan *community organization/community development*. Metode-metode tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1. Metode Pekerjaan Sosial *Casework*

*Casework* diakui sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang dikembangkan oleh ribuan pekerjaan sosial dalam berbagai bidang pelayanan sosial. Menurut Rex A Skidmore (1976) dalam Sundayani (2015:5) *Casework* merupakan sebagai berikut: “Proses untuk membantu individu-individu dalam mencapai penyesuaian satu sama lain serta penyesuaian antara individu dengan lingkungan sosialnya”. *Casework* merupakan metode yang terorganisir dengan baik untuk membantu orang agar mampu menolong dirinya serta ditujukan untuk meningkatkan, memperbaiki dan memperkuat keberfungsian sosial.

Metode pekerjaan sosial didasari oleh proses relasi yang bersifat individual dan tatap muka, pemahaman perilaku manusia yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah, merupakan suatu seni, dan mengkombinasikan elemen psikologis dan sosial dari kelayan. Menurut Sundayani (2015:6) bahwa: “Metode pekerjaan sosial *casework* terdapat beberapa komponen yaitu: *person* (klien), *problem* (masalah), *process*, dan *place*”. *Person* (klien) yaitu orang yang membutuhkan bantuan terhadap beberapa aspek kehidupan sosial emosionalnya. Klien ialah orang-orang yang menerima pelayanan profesional baik individu, keluarga, kelompok kecil, maupun masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua tipe kelayan yaitu kelayan sukarela dimana kelayan datang sendiri kepada pekerja sosial atas kehendak sendiri dan membawa masalah yang sedang dihadapi dan kelayan yang terpaksa dimana baik diserahkan oleh yang

berwenang maupun karena pekerja sosial yang diminta untuk mengontrak dan melakukan transaksi padanya.

Komponen metode pekerjaan sosial *casework* selanjutnya adalah *problem* (masalah) dimana masalah dapat timbul oleh adanya kebutuhan, rintangan-rintangan, dan kumpulan frustrasi. Stress merupakan tekanan yang mengakibatkan ketidakberfungsian, dengan demikian ketidakberfungsian inilah yang dikatakan masalah. Selanjutnya, komponen metode pekerjaan sosial *casework* adalah *place* (badan sosial) dimana badan sosial adalah semacam badan/lembaga yang tidak berurusan langsung dengan masalah-masalah sosial luas melainkan dengan kehidupan pribadinya. Tujuan dari badan tersebut adalah membantu individu yang mengalami rintangan-rintangan sosial tertentu yang mengganggu kehidupan pribadi dan keluarga serta yang mengalami masalah.

Komponen metode pekerjaan sosial *casework* yang terakhir adalah *process* (proses) dimana proses ini terdiri dari serangkaian usaha pemecahan masalah yang dilakukan melalui *relationships* yang diarahkan pada tujuan tertentu yaitu, mempengaruhi pribadi klien sehingga dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi/mempengaruhi masalah yang dapat dipecahkan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode pekerjaan sosial *casework* ini merupakan proses pertolongan terhadap individu yang mengalami permasalahan dalam hidupnya sehingga pekerja sosial harus dapat menggali informasi tentang permasalahan klien dengan pendekatan individu dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut.

## 2. Metode Pekerjaan Sosial *Groupwork*

*Groupwork* merupakan salah satu metode utama dalam praktek pekerjaan sosial. Metode ini menitik beratkan pada penggunaan kelompok yang dimanfaatkan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan kelayan. Menurut Gisela Konopka (1972) dalam Sundayani (2015:21) *social groupwork* yaitu: “Metode dalam pekerjaan sosial yang bertujuan untuk membantu keberfungsian individu dalam kelompok. Merupakan suatu pendekatan yang secara sadar diarahkan untuk mengembangkan kemampuan individu semaksimal mungkin dengan suatu kelompok”.

Berdasarkan definisi di atas bahwa pekerjaan sosial dalam kelompok merupakan suatu metode, dimana individu dalam kelompok serta badan sosial dibantu oleh pekerja sosial yang membimbing interaksinya dalam program kegiatan, sehingga mereka berhubungan dengan satu dengan yang lainnya untuk mencapai pertumbuhan yang matang dengan membantu keberfungsian sosial individu tersebut di dalam suatu kelompok. Menurut Albert S. Alisi (1980) dalam Sundayani (2015:25) tujuan yang dapat dicapai dari penggunaan metode *groupwork* sebagai berikut:

1. Perbaikan (*Restorative*)  
Apabila anggota kelompok mengalami disfungsi atau gangguan sosial dan *person* dalam lingkungan sosialnya, maka pengalaman kelompok dapat dijadikan untuk mengadakan perbaikan.
2. Pencegahan (*Preventif*)  
Apabila anggota kelompok terancam oleh kerusakan fungsi personal dan sosial, maka pengalaman kelompok dapat didayagunakan untuk mempertahankan serta meningkatkan pelaksanaan fungsi secara baik.
3. Pertumbuhan Sosial Secara Normal.  
Pengalaman kelompok yang dibimbing pekerja sosial mampu membantu memperlancar pertumbuhan sosial secara normal serta pelaksanaan fungsi-fungsi sosial secara lebih baik.

4. Peningkatan Kemampuan  
Kepribadian Pengalaman kolektif yang saling tukar menukar pengalaman dalam kelompok, maka individu akan mengembangkan keterampilan sosial, bakat, yang dicapai secara memadai melalui kehidupan individu.
5. Peningkatan tanggung jawab sosial dan partisipasi sebagai warga masyarakat  
Pengalaman kelompok yang terbimbing dengan baik akan mampu menciptakan pengalaman yang dapat membuat para anggota kelompok untuk menyerap nilai tanggung jawab terhadap sesama, nilai demokrasi, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode pekerjaan sosial *groupwork* ini bertujuan untuk membantu individu dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya di dalam kelompok melalui perbaikan, pencegahan, pertumbuhan sosial secara normal, peningkatan kemampuan pribadi, dan peningkatan tanggung jawab sosial dan partisipasi sebagai warga masyarakat.

### 3. Metode Pekerjaan Sosial (*Community Organization/Development*)

Metode pekerjaan sosial CO/CD atau biasa disebut pengembangan masyarakat adalah suatu proses dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan diri mereka sendiri melalui suatu aktivitas-aktivitas kolektif. *Community work* merupakan spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro. Menurut Johnson (1984) dalam Sundayani (2015:35) *community work* (pengembangan masyarakat) sebagai berikut: “*Community work* merupakan metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses yang mempengaruhinya”.

Intervensi makro mencakup model intervensi pengembangan masyarakat (*locality development*), perencanaan sosial (*social planning*), kebijakan sosial (*social policy*), dan administrasi dan manajemen. Prinsip-prinsip dalam pengembangan

masyarakat adalah landasan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pekerjaan sosial masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya hak asasi manusia, keseimbangan, pemberdayaan, hak milik rakyat dan lain-lain. Prinsip-prinsip tersebut harus terinternalisasi dalam diri pekerjaan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pekerjaan sosial CO/CD ini merupakan kegiatan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan diri mereka sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber yang sudah ada dengan semaksimal mungkin.

### **2.2.3. Intervensi pekerjaan sosial**

Intervensi pekerjaan sosial ini dibutuhkan dalam hal proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial, dalam proses pertolongan yang diberikan diperlukan adanya suatu aksi dalam hal mengembalikan atau memecahkan masalah sosial sehingga klien tersebut berfungsi secara sosial kembali. Pekerjaan sosial sebagai sebuah bidang keahlian atau profesi yang berarti memiliki landasan keilmuan dan seni dalam praktiknya. Pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, misalkan psikolog, dokter atau psikiater. Sebagai ilustrasi, pada saat mengobati pasien seorang dokter hanya memfokuskan perhatian pada penyakit pasien saja. Saat menghadapi klien, seorang pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan pula mempertimbangkan lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada.

Pekerjaan sosial memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya

melalui interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan, kekhasan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial, menurut Siporin yang dikutip oleh Fahrudin (2012:61) mengemukakan:

Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka selain itu pekerja sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktik teknik dan ilmiah.

Dari pengertian di atas pekerjaan sosial merupakan suatu profesi dalam suatu kelembagaan sosial dalam proses pertolongan secara profesional yang bertujuan dalam hal mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial dengan memberikan pelayanan secara penuh kepada klien baik itu individu, kelompok maupun masyarakat. Pada proses pertolongan pekerja sosial dibutuhkan metode, peran dan tahap-tahap dalam melakukan proses pertolongannya sehingga sesuai prosedur dan dasar dari kode etik pekerja sosial profesional.

#### **2.2.4. Peran-Peran Pekerja Sosial**

Mengacu pada Zastrow (1982) yang dikutip oleh Hurerah (2008:149), terdapat beberapa peran pekerja sosial dalam menangani suatu masalah, enam peran berikut ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan menangani suatu kasus atau masalah sosial:

##### *1. Enabler*

Peranan sebagai *enabler* adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan

mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih *efektif*.

2. *Broker*

Peranan sebagai *broker* adalah menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat. Peranan ini dilakukan oleh seorang *broker* karena individu atau kelompok tersebut kerap kali tidak mengetahui dimana dan bagaimana mendapatkan pertolongan tersebut.

3. *Expert*

Sebagai seorang *expert*, ia berperan menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area, misalnya seorang *expert* menyarankan tentang bagaimana struktur organisasi dapat dikembangkan dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat mana saja yang harus terwakili.

4. *Social Planner*

Seorang *social Planner* berperan mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis fakta-fakta tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut kemudian, mengembangkan program, mencari alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan konsesus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat dan kepentingan.

5. *Advocate*

Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana pekerja sosial melaksanakan fungsinya sebagai *advocate* yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pertolongan tersebut tidak memperdulikan ataupun menolak tuntutan masyarakat

6. *The Activist*

Sebagai seorang *activist*, ia senantiasa melakukan perubahan yang mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang tidak beruntung (*disadvantaged group*).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pekerja sosial dalam melakukan praktik pekerjaan sosial memiliki berbagai peran yang digunakan untuk membantu individu, kelompok, maupun masyarakat tergantung pada masalah yang dialami oleh individu, kelompok dan masyarakat tersebut.



### 2.2.5. Tujuan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi pekerjaan sosial ini dilaksanakan sebagai proses pertolongan pekerja sosial dalam hal menangani masalah klien, yang dimana dalam proses penanganannya ini baik secara *kuratif*, *preventif* maupun secara *edukatif*. Intervensi ini dilakukan berdasarkan metode-metode, tahap-tahap dan proses pertolongan yang dilakukan pekerja sosial secara profesional berdasarkan ilmu dan pengalaman yang didapat secara edukasional. Tujuan pekerjaan sosial menurut Zastrow yang dikutip oleh Fahrudin (2012:66) adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- b. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- c. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerja sosial.
- d. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Dari tujuan pekerjaan sosial di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial diperlukan adanya kebijakan, pelayanan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga sosial terkait dalam upaya mengurangi kemiskinan dan bentuk – bentuk ketidakadilan sosial, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya praktek pekerja sosial dalam menjalankan proses pertolongan yang dilakukan secara profesional. Selain pengertian di atas adapun menurut, Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dikutip oleh Fahrudin (2014-67) mengemukakan tujuan praktek pekerja sosial sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- 2) Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- 3) Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerja sosial.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Pekerja sosial pada dasarnya untuk mengetahui dan memahami intervensi dalam praktek pertolongan pekerjaan sosial berdasarkan landasan konseptual dari intervensi itu sendiri sehingga dalam kajian kasus intervensi praktek pekerjaan sosial berdasarkan teori-teori dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial. Intervensi pekerjaan sosial adalah upaya perubahan terencana yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap individu, kelompok, maupun komunitas agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya sehingga upaya dalam memperbaiki keberfungsian sosial ini tepat sasaran pada perubahan yang akan dicapai yang dimana merujuk pada keberfungsian sosial pada suatu kondisi dimana seseorang dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya.

#### **2.2.6. Fokus Intervensi Pekerjaan Sosial**

Pekerja sosial merupakan suatu profesi pertolongan profesional individu, kelompok maupun masyarakat yang fokus pertolongannya pada permasalahan sosial setiap individu dengan cara mengembalikan keberfungsian sosial individu dengan cara metode dan tahap yang diberikan secara berkala. Fokus intervensi pekerjaan sosial

adalah fokus yang ditunjukkan kepada orang atau klien, baik individu, kelompok, maupun masyarakat yang bersifat residual ataupun institusional, secara langsung maupun tidak langsung, yang dilandasi oleh seperangkat pengetahuan dan keterampilan dan kode etik. Berkaitan dengan hal ini, menurut Iskandar yang dikutip oleh Suharto (2014:5) mengemukakan tentang fokus intervensi pekerjaan sosial adalah:

Fokus intervensi pekerjaan sosial berhubungan dengan kemampuan pekerja sosial untuk memusatkan perhatiannya, baik terhadap usaha klien melihat aspek penting dari situasi tersebut, maupun memegang teguh beberapa kesimpulan dari fokus tersebut atau kemajuan yang telah dicapai. Hal ini berarti bahwa pekerja sosial harus dapat memahami satu aspek masalah atau alternatif pemecahannya.

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa fokus intervensi pekerjaan sosial ini ditujukan pada perhatian atau rasa empati pada individu dengan memperhatikan situasi sosialnya dan latar belakang permasalahan individu tersebut karena dengan memusatkan pada fokus masalah tersebut maka pekerja sosial akan menyimpulkan atas dasar aksi sosial dari latar belakang klien tersebut sehingga akan mengalami kemajuan yang akan dicapai. Dalam proses pertolongan pekerja sosial yang harus diperhatikan oleh pekerja sosial ini adalah langkah efektif dalam proses penanganan masalah individu dengan berbagai keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial karena hal tersebut akan mempermudah dalam proses pemecahan masalah sosial individu tersebut.

### **2.3. Tinjauan Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial**

#### **2.2.1. Usaha Kesejahteraan Sosial**

Usaha Kesejahteraan sosial pada umumnya hanya disebut pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah, instansi, atau lembaga tertentu, hal tersebut bertujuan untuk memberikan solusi dalam penyelesaian masalah – masalah sosial, akan tetapi usaha yang diberikan harus berjalan sesuai sistem dalam hal mewujudkan pengembangan kesejahteraan sosial sehingga mampu memelihara dalam proses dan pengakhirannya. Pengertian Usaha kesejahteraan sosial menurut Friedlander yang dikutip oleh Fachrudin (2014:15) yaitu:

Kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.

Usaha Kesejahteraan sosial ini ditunjukkan pada individu, kelompok, masyarakat yang bertujuan untuk mencegah atau menangani masalah sosial yang ada dengan cara adanya pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh komunitas, lembaga, instansi atau pemerintah dalam hal memberikan perlindungan dan pemeliharaan sumberdaya manusia sehingga terjadinya keseimbangan dalam menjalankan hidup sesuai fungsi dan perannya. Dalam UU No 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan

mengembangkan kesejahteraan sosial”. Sementara dalam UU No.11 Tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

### **2.3.2. Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial**

Usaha kesejahteraan sosial pada suatu organisasi / lembaga yang menyediakan layanan sosial dalam pandangan yang lebih luas seringkali disebut dengan nama organisasi pelayanan masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat dalam mengadakan usaha kesejahteraan sosial. Menurut Scneiderman (Isbandi,2012:87) menyatakan tiga tujuan dari suatu organisasi pelayanan masyarakat menyediakan Usaha Kesejahteraan Sosial:

1. Tujuan Kemanusiaan dan keadilan  
Tujuan ini bersumber dari gagasan ideal demokratis tentang keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri mereka yang dimiliki, meskipun terkadang potensi tersebut adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, kejiwaan maupun faktor lainnya. Usaha kesejahteraan sosial menjadikan mereka sebagai kelompok sasaran dalam upaya menjembatani kelangkaan sumber daya yang mereka miliki.
2. Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial  
Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan, kekurangan, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya akan dapat melakukan serangan atau menjadikan ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan, oleh karena itu kelompok masyarakat yang

sudah mapan berupaya mengamankan diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, pemilikan maupun stabilisasi yang sudah ada.

### 3. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang direncanakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Dalam hal ini maka disebutkan bahwa pembangunan ekonomi ini harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat dengan itu maka akan berdampak baik pada kelangsungan kehidupan sesama.

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa tujuan usaha kesejahteraan sosial dalam pelayanan organisasi sosial di masyarakat adalah suatu tindakan dalam membangun usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan bermaksud dalam mencapai kesejahteraan sosial yang merata sehingga masyarakat mampu dalam menjalankan fungsi sosialnya.

### **2.3.3. Fokus Usaha Kesejahteraan Sosial**

Usaha Kesejahteraan sosial pada umumnya berbentuk dari pelayanan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, pendampingan dan perlindungan terhadap individu yang mengalami masalah sosial. Merujuk pada definisi *welfare* dari Howard Jones yang dikutip oleh Soeharto (2014:8), mengatakan bahwa: “Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial yang utama dan pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan manifestasinya”, seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni. Soeharto (2014:9) mengungkapkan bahwa: “Usaha Kesejahteraan Sosial memfokuskan pada 3 bidang, yaitu: pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat”.

## 2.4. Tinjauan tentang Peran

Peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahnya mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

### 2.4.1. Definisi Peran

Soekanto (2015) menjelaskan bahwa Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu peranan. Arti peran (*role*) dalam sosiologi adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Kemudian menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Alex Inkles dalam Pujileksono dan Wuryantari (2019) menyatakan bahwa peran mengacu pada kumpulan hak atau kewajiban yang diharapkan atau normatif yang diizinkan dan diminta dari orang yang secara umum merasa menjadi kewajiban dari status yang diakui oleh orang lain yang berpartisipasi dalam sistem sosial yang sama

Definisi lain yang senada dengan pendapat-pendapat diatas dikemukakan oleh Cohen dalam Pujileksono dan Wuryantari peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (2019).

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah pola perilaku yang komprehensif yang diakui secara sosial, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan menempatkan individu dalam masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Kemudian dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang



terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, seperti perannya dalam melaksanakan program kelompok usaha bersama fakir miskin yang mana itu merupakan salah satu program yang mereka lakukan atas perintah dari Dinas Sosial.

Definisi lain yang sependapat dengan pendapat-pendapat diatas dikemukakan oleh Cohen dalam Pujileksono dan Wuryantari peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (2019).

Ruang Lingkup Peran Dalam Soekanto (2015: 213) disebutkan bahwa peranan mencakup tiga hal dibawah ini:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Karakteristik Peran dalam Pujileksono dan Wuryantari (2019:164) karakteristik peran dapat dipelajari melalui beberapa hal berikut ini:

1. Aspek Aksi Status

Peran sebenarnya adalah aspek aksi status dalam melibatkan berbagai jenis tindakan yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan harapan masyarakat. Tindakan ini tidak bergantung pada kehendak individu tetapi

pada sanksi sosial. Itulah sebabnya dikatakan bahwa setiap peran sosial memiliki basis budaya.

#### 2. Mengubah Konsep Peran

Peran sosial sebagaimana telah dinyatakan, sesuai dengan nilai-nilai sosial, cita-cita, pola dll. Cita-cita, nilai-nilai, dan tujuan dapat berubah dan konsep peran juga berubah. Peran yang dibenarkan pada waktu tertentu tidak dapat dibenarkan pada waktu lain.

#### 3. Bidang Operasi Terbatas

Setiap peran memiliki area operasi yang terbatas dan perannya harus dibatasi dalam hal itu. Misalnya, seorang Pekerja Sosial memiliki peran sebagai konselor pada saat di tempat kerjanya, tetapi ketika berada di keluarganya, peran itu terhenti

#### 4. Peran tidak dilakukan 100% untuk Pemenuhan Harapan

Tidak mungkin bagi siapa pun untuk melakukan perannya sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Pasti ada beberapa perbedaan; misalnya seseorang mungkin tidak dapat melakukan perannya untuk kepuasan penuh kebutuhan anak-anak yang mengalami ketelantaran.

#### 5. Perbedaan Pentingnya Peran

Dari sudut pandang, sosio-kultural semua peran tidak sama pentingnya. Beberapa peran lebih penting sementara yang lain kurang. Peran yang paling penting disebut peran kunci sementara peran yang secara umum penting, disebut peran umum.

### **2.4.2. Ruang Lingkup Peran**

Dalam Soekanto (2015: 213) disebutkan bahwa peranan mencakup beberapa hal yang dijelaskan dibawah ini:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### 2.4.3. Karakteristik Peran

Dalam Pujileksono dan Wuryantari (2019:164) karakteristik peran dapat dipelajari melalui beberapa hal berikut ini:

1. Aspek Aksi Status  
Peran sebenarnya adalah aspek aksi status dalam melibatkan berbagai jenis tindakan yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan harapan masyarakat. Tindakan ini tidak bergantung pada kehendak individu tetapi pada sanksi sosial. Itulah sebabnya dikatakan bahwa setiap peran sosial memiliki basis budaya.
2. Mengubah Konsep Peran  
Peran sosial sebagaimana telah dinyatakan, sesuai dengan nilai-nilai sosial, cita-cita, pola dll. Cita-cita, nilai-nilai, dan tujuan dapat berubah dan konsep peran juga berubah. Peran yang dibenarkan pada waktu tertentu tidak dapat dibenarkan pada waktu lain.
3. Bidang Operasi Terbatas  
Setiap peran memiliki area operasi yang terbatas dan perannya harus dibatasi dalam hal itu. Misalnya, seorang Pekerja Sosial memiliki peran sebagai konselor pada saat di tempat kerjanya, tetapi ketika berada di keluarganya, peran itu terhenti
4. Peran tidak dilakukan 100% untuk Pemenuhan Harapan  
Tidak mungkin bagi siapa pun untuk melakukan perannya sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Pasti ada beberapa perbedaan; misalnya seseorang mungkin tidak dapat melakukan perannya untuk kepuasan penuh kebutuhan anak-anak yang mengalami ketelantaran.
5. Perbedaan Pentingnya Peran  
Dari sudut pandang, sosio-kultural semua peran tidak sama pentingnya. Beberapa peran lebih penting sementara yang lain kurang. Peran yang paling penting disebut peran kunci sementara peran yang secara umum penting penting, disebut peran umum.

## 2.5. Tinjauan tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)

### 2.5.1. Definisi tenaga kesejahteraan sosial (TKS)

Tenaga kesejahteraan sosial (TKS) adalah adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun

swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah mereka yang berlatarbelakang pendidikan pekerjaan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial yang memiliki pengalaman pelayanan sosial minimal 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKS adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut Dra. Umi Ratih Santoso dalam bukunya menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang atas dasar sukarela mengabdikan dirinya di bidang usaha kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput.

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah seorang yang memiliki kualitas pendidikan non pekerja sosial yang memiliki pengalaman dalam bidang kesejahteraan sosial dan dididik serta dilatih dalam bidang kesejahteraan sosial.

### **2.5.2. Peran-peran tenaga kesejahteraan sosial**

A. Peran tenaga kesejahteraan sosial yang ada di P2TP2A Jawa Barat menurut profil dan buku pedoman pelaksanaan teknis P2TP2A Jawa Barat

- a. Konsultan, memberikan solusi-solusi bagi korban trafiking yang di jaring oleh P2TP2A.
- b. Medis, dalam kasus trafiking tidak sedikit korban menerima perlakuan kekerasan yang menimbulkan luka fisik, sehingga harus ada penanganan sesegera mungkin sebelum dilarikan ke rumah sakit.
- c. Psikolog, penanganan psikologis dilakukan kepada korban karena banyak korban yang mengalami trauma.
- d. Spiritual, dimaksudkan untuk penguatan mental korban trafiking karena seringkali bahkan kebanyakan korban mengalami droup dan membutuhkan penguatan mental.
- e. Pendamping hukum, sebagai bentuk advokasi terhadap korban, sehingga pendampingan hukum dilakukan agar tidak terjadi kesemenaan dalam penagakan hukum terhadap korban.
- f. Pelatih, pelatihan dilakukan sebelum korban dikembalikan kepada keluarga, hal ini dimaksudkan agar ketika korban kembali kepada keluarga, korban bisa kembali menjalankan fungsi sosialnya.
- g. Terapis dan pemulih, terapi dan pemulihan korban trafiking secara berkelanjutan, baik dilakukan di P2TP2A tingkat kabupaten dan dibantu oleh para relawan.

B. Menurut Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Integrasi Sosial Bapak Dr. Sahawiah Abdullah, M.Si dalam penelitiannya (2011) menerangkan peran tenaga kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Penyedia data dan informasi di tingkat lokal.
2. Membantu melakukan seleksi calon penerima program bantuan sosial.
3. TKS melakukan pendamping kepada KUBE untuk meningkatkan pendapatan warga miskin.
4. Memberikan motivasi kepada masyarakat penerima program bantuan sosial.
5. Memberikan bimbingan sosial dan motivasi kepada penerima program agar dapat melakukan perilaku yang lebih baik.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PMKS
7. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
8. TKS membantu masyarakat sebagai tenaga penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Namun demikian peran tersebut belum optimal.
9. TKS menggerakkan masyarakat untuk memelihara adat istiadat setempat sebagai dasar melakukan kegiatan masyarakat.
10. TKS mendirikan pusat pelayanan kesejahteraan sosial (Puspelkesos) di tingkat kecamatan sebagai tempat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. TKS memelihara semangat kesetiakawanan sosial dengan membangun kesadaran di kampung-kampung, mengumpulkan dana dari masyarakat.
12. TKS melakukan pendataan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dengan baik.
13. TKS melakukan pendampingan dan sebagai fasilitator kegiatan masyarakat dengan tulus.
14. Sebagai penyuluh dan fasilitator dalam upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai sosial.

## **2.6. Tinjauan tentang fakir miskin**

Pengertian Fakir Miskin Fakir adalah orang yg tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari kerjaan halal,atau punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi,dalam gambaran hasilnya itu kurang dari 50% dari kebutuhan. Contoh, 1 hari kebutuhan 10 ribu, dia punya uang atau penghasilan tapi dibawah 5 ribu atau tidak punya harta ataukerjaan yang halal sama sekali. Miskin yaitu orang yang punya harta atau pekerjaan atau keduanya dari harta yang mencukupinya itu kira-kira 50% sampai

90% dari kebutuhannya.maksudnya ini misalkan kebutuhan seharinya itu 10 ribu,tapi harta/kerjaannya hanya dapat gaji 5-9 ribu saja.

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.<sup>1</sup> Dalam pandangan Islam, kemiskinan (al-miskin) atau kefakiran (alfaqr) indikasinya sama, jika kebutuhan dasar setiap indivu perindividu dalam masyarakat (sandang, papan, dan pangan) tidak terpenuhi. Termasuk kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dan sekalipun yang terakhir ini merupakan tanggung jawab Negara secara langsung.

## **2.7. Tinjauan tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga

### **2.7.1. Definisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Kelompok Usaha Bersama adalah salah satu pendekatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kegiatan pemberdayaan ini meliputi pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pendampingan dalam merintis dan mengembangkan usaha serta peningkatan keterampilan teknis anggota.

Keberadaan KUBE bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan). Kehadiran KUBE merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.



### 2.7.2. Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Menurut Pentunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (2015:8) menyatakan bahwa tujuan umum KUBE adalah “Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui terwujudnya penghidupan yang berkelanjutan dan juga meningkatkan keberfungsian sosial para anggota kelompok”. Tujuan khusus dari KUBE, meliputi:

1. Meningkatnya kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Meningkatnya kemampuan anggota dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi khususnya dalam pengembangan usaha.
3. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan peranan sosial dalam masyarakat.

KUBE merupakan usaha pemberdayaan ekonomi yang sangat relevan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan para anggotanya. Pentunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (2015:2) dinyatakan bahwa KUBE memiliki tiga aspek dimensi pondasi sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yaitu:

- a. Kelembagaan  
Nilai kelembagaan KUBE adalah terjadinya “*self learning proces*” dikalangan anggota untuk mengelola usaha dengan mengoptimalkan sistem kelembagaan yang terstruktur dengan baik meskipun dalam pola yang sederhana, termasuk belajar berorganisasi. Dengan demikian, KUBE sekaligus dapat dipandang sebagai “*learning building organization*” bagi anggotanya.

b. Sosial

Nilai sosial yang terkandung didalam KUBE adalah nilai kejujuran, komitmendan integritas, tanggung jawab sosial, partisipasi, kesetiakawanan sosial, dan gotong royong.

c. Ekonomi

Nilai ekonomi yang terkandung di dalam KUBE adalah terwujudnya sejumlah indikator ekonomi mikro terutama yang bertautan dengan “*employment-income generating-growth*”, yang berujung pada peningkatan kehidupan ekonomi keluarga. Dengan KUBE, maka orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dapat bekerja (*employment*) atau dari para pekerja lepas/serabutan menjadi tetap, memperoleh penghasilan secara tetap, bahkan beberapa diantaranya meningkatkan pendapatannya (*income generating and maintenance*) serta memiliki tabungan dan peningkatan modal usaha karena kemampuannya untuk mengakses lembaga keuangan sesuai kebutuhan usaha.

### 2.7.3. Sasaran dan Kriteria Calon Anggota KUBE

Sasaran dari program Kelompok Usaha Bersama ditentukan dengan berbagai aspek atau indikator yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUBE (2015: 8) yang menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme penentuan sasaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu:

1. Mekanisme Rujukan Program:

- a. Sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sudah mendapat pelayanan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) baik dengan status graduasi ataupun transisi dengan prioritas utama status transisi.
- b. Sasaran Kepala Keluarga dalam satuan wilayah Komunitas Adata Terpencil (KAT) yang telah menyelesaikan Program Pemberdayaan KAT dari Direktorat Pemberdayaan KAT (Purnabina KAT).
- c. Sasaran purnabina lain, baik dari program Kementerian Sosial ataupun program lintas sektoral.
- d. Dimungkinkan juga sinergi antar program dimana sasaran bisa mendapatkan bantuan stimulan KUBE pada saat menerima program lain tersebut guna mempercepat capaian untuk mengantarkan sasaran keluar dari kemiskinan.

2. Mekanisme Non Rujukan Program:

- a. Sasaran Kepala Keluarga yang tergolong Keluarga Sangat Miskin (RTSM), baik yang terdata maupun belum terdata pada Basic Data Terpadu (BDT).

Untuk menetapkan sasaran ini, diperlukan verifikasi lain untuk memastikan peserta terbebas dari kemungkinan salah sasaran (*inclusion error dan exclusion error*) dengan memepedomi Keputusan Menteri Sosial RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, baik berlokasi di wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan atau perbatasan antar Negara sesuai UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

- b. Dimungkinkan juga dalam mekanisme non rujukan program, terdapat kasus khusus dimana masyarakat dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan stimulan KUBE selama anggota memenuhi kriteria calon anggota yang diatur dalam juknis. Kasus khusus ini meliputi kondisi seperti pasca bencana alam, krisis ekonomi ataupun kondisi lain yang memerlukan bantuan stimulan KUBE mendesak.

#### **2.7.4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUBE juga memberikan penjelasan dan mengatur secara jelas tentang Kriteria Calon Anggota KUBE. Adapun kriteria calon anggota KUBE yaitu:

1. Merupakan RTSM yang memenuhi kriteria miskin seperti dimaksudkan Kepmensos RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Pendataan Orang Tidak Mampu, serta telah dilakukan verifikasi Purnabina KAT untuk meminimalisir inclusion error atau exclusion error.
2. Khusus untuk sasaran Purnabina KAT adalah seluruh anggota komunitas yang telah mendapatkan pemberdayaan KAT dari dan diusulkan oleh Direktorat Pemberdayaan KAT.
3. Khusus untuk sasaran PKH adalah keluarga sangat miskin yang telah menyelesaikan keikutsertaan secara penuh melalui PKH, ataupun yang masih menerima program PKH guna mempercepat capaian untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan.
4. Diutamakan memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki embrio usaha ekonomi produktif atau usaha kecil.
5. Memiliki kemauan untuk dapat bekerja secara berkelompok.
6. Telah menikah dan memiliki keluarga serta masih dalam usia produktif.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilaksanakan secara berkesinambungan, yang diawali dengan Tahap Persiapan (T0), Tahap

Pembentukan/Perintisan Usaha Ekonomi Produktif atau pelaksanaan (UEP) yang disebut sebagai tahap (T1), Tahap Pengembangan UEP (T2) dan Tahap Kemitraan KUBE (T3).

Tahapan pelaksanaan program kelompok usaha bersama sebagai berikut:

#### Tahap Persiapan

- Orientasi Dan Observasi.
- Registrasi Dan Identifikasi.
- Perencanaan Program Pelaksanaan.
- Penyuluhan Sosial Umum,
- Bimbingan Pengenalan Masalah.
- Bimbingan Motivasi dan
- Evaluasi Persiapan

#### Tahap Pembentukan

- Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosia! (kbs)
- Pembentukan Pra Kelompok Dan Kelompok;
- Pemilihan/penentuan Jenis Usaha Peralihan
- Peralihan Ketrampilan Anggota Kube,
- Pemberian Bantuan Makanan Atau Santunan
- Bantuan Stimulan Permodalan,
- Pendampingan Dan Evaluasi

#### Tahap Pengembangan Usaha:

- Bimbingan pengembangan usaha
- Pemberian bantuan pengembangan usaha
- Pendampingan dan evaluasi

#### Tahap Kemitraan Usaha

- Inventarisasi sumber-sumber yang ada
- Membuat kesepakatan-kesepakatan
- Pelaksanaan kemitraan usaha
- Bimbingan kemitraan usaha
- Perluasan jaringan kemitraan usaha
- Evaluasi

Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga dibagi menjadi dua yaitu: Kelompok Usaha Bersama atau KUBE Produksi dan Kelompok Usaha Bersama atau KUBE Jasa. Untuk tahap T2 yaitu pengembangan Usaha Ekonomi Produkti (UEP) pada tahun lalu tepatnya tanggal 26 Juni 2016 dibentuk dan dijalankan program baru sebagai bentuk pengembangan dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disebut dengan Program e-Warung KUBE PKH atau Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama PKH.